



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 336 /406.001.3/2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118));
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Lampiran II Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Lampiran III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Lampiran IV Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Lampiran V Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
6. Lampiran VI Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Lampiran VII Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Lampiran VIII Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
9. Lampiran IX Dinas Pertanian dan Pangan;
10. Lampiran X Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Lampiran XI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Lampiran XII Dinas Perhubungan;
13. Lampiran XIII Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Lampiran XIV Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;

15. Lampiran XV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Lampiran XVI Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
17. Lampiran XVII Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Lampiran XVIII Dinas Perikanan;
19. Lampiran XIX Sekretariat Daerah;
20. Lampiran XX Sekretariat DPRD;
21. Lampiran XXI Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Lampiran XXII Badan Keuangan Daerah;
23. Lampiran XXIII Badan Kepegawaian Daerah;
24. Lampiran XXIV Inspektorat;
25. Lampiran XXV Kecamatan Trenggalek;
26. Lampiran XXVI Kecamatan Panggul;
27. Lampiran XXVII Kecamatan Suruh;
28. Lampiran XXVIII Kecamatan Durenan;
29. Lampiran XXIX Kecamatan Pogalan;
30. Lampiran XXX Kecamatan Watulimo;
31. Lampiran XXXI Kecamatan Tugu;
32. Lampiran XXXII Kecamatan Dongko;
33. Lampiran XXXIII Kecamatan Kampak;
34. Lampiran XXXIV Kecamatan Munjungan;
35. Lampiran XXXV Kecamatan Pule;
36. Lampiran XXXVI Kecamatan Gandusari;
37. Lampiran XXXVII Kecamatan Bendungan;
38. Lampiran XXXVIII Kecamatan Karangan;
39. Lampiran XXXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
40. Lampiran XL Dinas Peternakan.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524 199703 1 001

**LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 188.45/336/406.001.3/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PADA KECAMATAN SURUH TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program, kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan Bupati.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Pergeseran keadaan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

Dasar pertimbangan disusunnya perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2023 diantaranya adalah karena terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

Secara ringkas, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD tahun 2023 adalah karena:

1. Penggunaan SILPA tahun 2022;
2. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja;
3. Perlunya penambahan dana untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023; dan
4. Percepatan target capaian program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 perlu dilakukan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode

(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum yang definitif.

Prinsip- Prinsip didalam penyusunan Perubahan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2023, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tahun 2023.
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang diusun kedalam Rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun- tahun sebelumnya.
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan, tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat, menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Perubahan Renja PD, serta mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Selaras dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang didukung dengan Perubahan Renja-PD tahun 2023, maka sesuai amanat tersebut Kecamatan Suruh menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun agar dalam mengoperasionalkan RKPD lebih fokus dan terarah, disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah *Provinsi* Jawa Timur Tahun 2011—2031;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026

29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 18).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 adalah untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun agar dalam mengperasionalkan RKPD lebih fokus dan terarah, disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 yaitu:

1. Sebagai acuan Kecamatan Suruh dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Menyempurnakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Suruh agar lebih fokus dan terarah sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 adalah:

1. Hasil evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023.
2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar rekening dan/ atau kegiatan serta penambahan/ pengurangan jenis belanja.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan Perubahan RKPD membawa konsekuensi kepada setiap Perangkat Daerah untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja). Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2023 disusun dan merujuk pada Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan serta memperhatikan

program dan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Adapun Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah **“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Sdm Inovatif, Kolaboratif serta Insfrastruktur Berwawasan Lingkungan”**.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang mendukung Tema Pembangunan Tahun 2023 ada 2 (dua) Prioritas yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Meningkatnya Pembangunan Insfrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan .

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 disusun dengan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/ menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
Dilengkapi dengan matriks **format (terlampir)**.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penamabahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja.
Dilengkapi dengan kertas kerja matriks sesuai dengan **hasil entry dari aplikasi SIPD**.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal- hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan pada sebelum perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022, maka pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ada penambahan sebesar Rp. 47.400.000,- (Empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengganti HR Tenaga Penunjang Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Untuk operasional Kecamatan dan Optimalisasi pelaksanaan, pelimpahan Sebagian kewenangannya itu acara Mening Dech sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- Ada tambahan dari Insentif PBB sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima Juta rupiah) digunakan untuk operasional Umum Kecamatan kecuali untuk honor.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Suruh dari Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada dasarnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Adapun gambaran terhadap capaian kinerja Kecamatan Suruh sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada matrik di bawah ini.

**Tabel Matrik Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	Kecamatan								
7.0101	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	175,00	175,00	275	275,00
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	91,99	100	26,40	26,40	118	118,39
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	98,76	100	97,64	97,64	196	196,40
7.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36	8	8	25	313	33	92

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	8	8	4	50	12	120
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	0	26	21	81	21	81
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	94,7	100	87,00	87,00	182	181,70
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	84,11	17	17,00	100,00	101	594,76
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	36	50	26,00	52,00	62	124,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	347	0	347	149,00	42,94	149	42,94
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	0	38	20,00	52,63	20	52,63
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100	0	27	40,74	150,89	41	40,74

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27	0	27	11,00	40,74	11	40,74
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	0	100	37,29	37,29	37	37,29
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59	0	59	22,00	37,29	22	37,29
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	98,91	100	37,50	37,50	136	136,41
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	-	-	4	100,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	1	25,00	5	125,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	4	2	50,00	6	150,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	2	50,00	6	150,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	4	4	2	50,00	6,00	150,00

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	6	50,00	18,00	150,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	100	100	-	-	100	1
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	1	4	-	-	1	33
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	82,35	100	51,28	51	134	134
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	36	18	50	54	150
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	10	5	50	15	150
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	11	13	7	54	18	138
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	100	19,19	19	119	119

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	10	11	3	27	13	118
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	37	45	5	11	42	93
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100	75,00	75	175	175
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun (dokumen)	12	12	2	2	100	14	117
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	3	2	2	100	5	250
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12	12	12	6	50	18	150
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12		12	6	50	6	50

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	4	12	6	50	10	83
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100	100	100	25	25	125	125
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	12	12	12	25	208	37	3
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12	1	12	3	25	4	0
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100	100	100	50	50	150	2
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12	12	12		-	12	1
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	5	12	6	50	11	1
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	4	12	3	25	7	1

07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100	100	50	50	150	150
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12	12	12	6	50	18	2
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45	12	45	12	27	24	1
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49	14	49	22	45	36	1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/ rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan Bupati. Dengan adanya Perubahan RKPD tersebut maka harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap perkembangan keadaan yang diantaranya meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 5) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Program dan Kegiatan Belanja pada APBD Perubahan

Pada APBD Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Suruh Mengampu 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan, yang kesemuanya diharapkan dapat mencapai kinerja 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan dan Perubahan RKPD Tahun 2023		
		Target Kinerja	Satuan Kinerja	Pagu anggaran
KECAMATAN SURUH				2.389.487.007

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	2.315.026.142
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	%	
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,64	%	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	59	dokumen	1.907.172
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14	Dokumen	953.586
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45	laporan	953.586
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	2.169.919.653
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang/bulan	2.108.109.707
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	Dokumen	60.150.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	291	dokumen	953.586
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	laporan	706.360
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100	%	953.586
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29	laporan	953.586
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	%	441.475
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43	dokumen	441.475
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	59.829.640
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	1.298.946
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	4.058.471
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	1.870.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	5.000.000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	paket	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	27.602.223
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	%	5.186.261
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.186.261
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	%	52.117.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	20.655.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	laporan	2.250.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	29.212.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	24.670.555
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	22.572.755
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	2.097.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	%	51.434.282
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2	dokumen	21.770.394
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	laporan	21.770.394
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12	dokumen	29.663.888
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12	dokumen	1.960.148
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	laporan	27.703.740
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang	100	%	5.698.849

DAN KELURAHAN	dilaksanakan			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	3	laporan	5.698.849
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	3	laporan	5.698.849
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100	%	9.910.959
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12	laporan	9.910.959
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	8.321.650
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	laporan	1.589.309
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100	%	7.416.775
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12	dokumen	7.416.775
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	dokumen	2.913.733
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	33	dokumen	4.503.042

Sejalan dengan Tema Pembangunan Trenggalek Tahun 2023 adalah adalah **“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstern Melalui Sdm Inovatif, Kolaboratif serta Insfrastruktur Berwawasan Lingkungan”**.yang dilaksnakan dengan 2 (dua) prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek yaitu :

- a) Meningkatnya SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;
- b) Meningkatnya Pembangunan Insfrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan .

Pada Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 maka program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada Perubahan Renja Tahun 2023 dapat

dilihat pada **kertas kerja matrik sesuai dengan hasil entry dari aplikasi SIPD seperti pada table di bawah ini.**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA)
Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capai an REN JA Tahu n 2021	Praki raan Capai an Targe t RENJ A Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokas i	Su mb er Da na		Prioritas			
										Semul a	Menja di	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA 2023 Perubaha n				Nasion al	Daerah		Target
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN					2.486.25 3.481	2.389.48 7.007	2.236.03 3.374				2.556.06 5.681					
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	2.364.25 3.481	2.311.49 4.344	2.149.80 2.509		100 %	2.456.06 5.681				
						Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %					100 %					
						Persentase nilai aset dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %					100 %					
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	59 Dokumen	3.000.000	1.907.172	1.907.172		59 Dokumen	3.000.000				

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	14 Dokumen	1.500.000	953.586	953.586	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kematatan Suruh	14 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				26 Laporan	45 Laporan	1.500.000	953.586	953.586	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kematatan Suruh	45 Laporan	1.500.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	%		%	100 %	100 %	2.153.587.681	2.169.919.653	1.977.296.020						100 %	2.153.587.681	

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.096.805.681	2.108.109.707	1.907.256.074	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	16 Orang/bulan	2.096.805.681	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	54.282.000	60.150.000	68.380.000	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	50 Dokumen	54.282.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				340 Dokumen	291 Dokumen	1.000.000	953.586	953.586	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	291 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				38 Laporan	38 Laporan	1.500.000	706.360	706.360	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	38 Laporan	1.500.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	%	%		100 %	100 %	2.000.000	953.586	2.977.586						100 %	2.000.000	
7	1	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				27 Laporan	29 Laporan	2.000.000	953.586	2.977.586	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	29 Laporan	2.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	%	%		100 %	100 %	1.000.000	441.475	441.475						100 %	1.000.000	

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				59 Dokumen	43 Dokumen	1.000.000	441.475	441.475	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pegawai Kecamatan Suruh	43 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	%	%	100 %	100 %	77.478.000	56.297.842	67.252.848							100 %	122.573.091	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000	1.298.946	1.298.946	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	2 Paket	6.000.000	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	15.000.000	4.058.471	4.058.471	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	4 Paket	26.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	4.000.000	1.870.000	1.870.000	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	4 Paket	4.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	7.298.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	4 Paket	7.073.091	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	4 Paket	35.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	2.500.000	0	0	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	0 Laporan	2.500.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23.680.000	24.070.425	35.025.431	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	12 Laporan	42.000.000	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	%	%	100 %	100 %	17.000.000	5.186.261	14.836.261						100 %	45.000.000	
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	2 Unit	17.000.000	5.186.261	14.836.261	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kematatan Suruh	2 Unit	45.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	%	%	100 %	100 %	54.867.800	52.117.800	54.517.800						100 %	65.800.000	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	20.655.000	20.655.000	20.655.000	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kematatan Suruh	36 Laporan	27.000.000	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000	2.250.000	2.250.000	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	10 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	29.212.800	29.212.800	31.612.800	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Aparatur Kecamatan Suruh	13 Laporan	28.800.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%		%	100 %	100 %	55.320.000	24.670.555	30.573.347						100 %	63.104.909	

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	28.320.000	22.572.755	27.975.547	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Barang Milik Daerah	11 Unit	28.320.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	5.000.000	0	0	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Barang Milik Daerah	0 Unit	5.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6 Unit	5.000.000	2.097.800	2.597.800	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Barang Milik Daerah	6 Unit	7.784.909	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	1	2,09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				0 Unit	0 Unit	17.000.000	0	0	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Barang Milik Daerah	0 Unit	22.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%	%	100 %	100 %	92.152.000	54.966.080	63.204.282							100 %	70.152.000	
7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000	21.770.394	21.770.394							2 Dokumen	15.000.000	
7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	27.000.000	21.770.394	21.770.394	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Desa dan Kecamatan Suruh	2 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SURUH

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	Do ku men		Doku men	12 Do kumen	12 Do kumen	65.152.000	33.195.686	41.433.888					12 Do kumen	55.152.000		
7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Do kumen	12 Do kumen	2.000.000	1.960.148	1.960.148	Kab. Treng galek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Suruh	12 Do kumen	2.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	12 Laporan	63.152.000	31.235.538	39.473.740	Kab. Treng galek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Suruh	12 Laporan	53.152.000	KECAMATAN SURUH
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	9.750.000	5.698.849	5.698.849					100 %	9.750.000		

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang disusun	Laporan		Laporan	12 Laporan	3 Laporan	9.750.000	5.698.849	5.698.849					3 Laporan	9.750.000		
7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	9.750.000	5.698.849	5.698.849	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Suruh	3 Laporan	9.750.000	KECAMATAN SURUH
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	11.848.000	9.910.959	9.910.959					100 %	11.848.000		
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.848.000	9.910.959	9.910.959					12 Dokumen	11.848.000		

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	12 Laporan	10.000.000	8.321.650	8.321.650	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Suruh	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	3 Laporan	1.848.000	1.589.309	1.589.309	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Suruh	3 Laporan	1.848.000	KECAMATAN SURUH
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	%	%	100 %	100 %	8.250.000	7.416.775	7.416.775						100 %	8.250.000		

**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000	7.416.775	7.416.775						12 Dokumen	8.250.000	
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	23 Dokumen	3.000.000	2.913.733	2.913.733	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	23 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN SURUH
7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	33 Dokumen	5.250.000	4.503.042	4.503.042	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	33 Dokumen	5.250.000	KECAMATAN SURUH
TOTAL												2.486.253.481	2.389.487.007	2.236.033.374							2.556.065.681	

**BAB IV
P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan - persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi sebagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para palaku (stakeholders) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja dilakukan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun agar dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah lebih fokus dan terarah, disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Suruh. Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyempurnakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Suruh. Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Suruh sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524 199703 1 001